

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Soekarno menyeru umat Islam untuk “menggali api Islam”, karena Soekarno melihat bahwa kaum Muslimin baik di Indonesia maupun di dunia saat itu, hanya mewarisi “abu” dan “arang” yang mati dan statis dari warisan kultural.¹ Kemunduran Islam disebabkan karena pensakralan fiqh dan ijma ulama yang kemudian berujung pada penutupan pintu ijtihad, bahkan Fiqh telah menjadi algojo roh semangat Islam. Dalam persoalan tabir, pensucian bekas jilatan anjing, transfusi darah, perbedaan bank dengan riba harus dilakukan rekonstruksi kalau Islam ingin maju.²

Al-Qur'an dan Hadits sebagai azas Islam harus elastis, yakni mengikuti manusia dan memberi kelonggaran kepada kehendak zaman yang disebutnya dengan istilah progres. Konsep agama dengan rumusan ilmu pengetahuan modern dan sains bekerja sama untuk memberikan makna bagi kehidupan umat manusia. Akan tetapi banyak orang salah persepsi tentang Soekarno. Pandangan yang keliru tersebut di atas, disebabkan karena latar belakang politik dan biografi Soekarno yang lahir dan dibesarkan dari keluarga yang tidak membaca al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ayahnya seorang priyayi Jawa, pengikut theosofi.³ Sedangkan ibunya seorang perempuan Bali yang beragama Hindu. Bahkan menurut M Dawam Rahardjo bahwa Soekarno, yang disebut Putera Fajar, bukan dilahirkan dari kalangan Muslim santri, melainkan dari keluarga abangan.⁴

¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderan dan Ke-Indonesia-an*, (Bandung : PT Mizan : 1993), hlm., 121.

² *Ibid.*, hlm. 124.

³ Teosofi bersifat filsafat keagamaan, secara harfiah memiliki pengertian sebagai sikap kearifan Illahiah. Teosofi bertujuan mengajarkan kesucian moral. Tiada agama yang lebih tinggi dari kesucian. Tujuan lain untuk mendamaikan semua agama, sekte-sekte dan bangsa-bangsa di bawah satu sistem etika umum pada kenyataan abadi. Ada tiga garapan masyarakat teosofi, yaitu : Pembentukan inti persaudaraan kemanusiaan yang universal tanpa membedakan ras, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin dan golongan. Peningkatan kajian terhadap perbandingan agama, filsafat dan ilmu. Pelacakan hukum-hukum alam yang belum terpecahkan dan kekuatan-kekuatan tersembunyi dalam diri manusia. Penganjur gerakan ini adalah Helena Petrovna Blavatsky tahun 1831 – 1891. Helena Petrovna Blavatsky, *Kunci Pembuka Ilmu Theosofi*, Terj. R.S. Suyatno, (Jakarta ; Pustaka Theosofi Perwathin ; 1972), hlm., 1-2. Pengikut teosofi yang aktif antara lain Moh Yamin, Sanusi Pane, dan Dr. Amir.

⁴ Symbol muslim adalah selalu memakai sarung dan surban, maka Soekarno bukan seorang muslim., jelas Soekarno bukan muslim. Tetapi, apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim adalah yang menjalankan perintah Allah Swt serta menjauhi larangannya, maka Soekarno adalah seorang muslim. M Dawam Rahardjo, Published June 1, 2009 *Agama Leave a Comment Tags : Ahmadiyah, Ahmadiyah, Indonesia, Islam, Islam Liberal, Khalifah, Muhamadiyah, NU, RI, Soekarno.* <http://denagis.wordpress.com/2009/06/01/Soekarno-pelopor-pemikiran-islam-liberal>. hlm., 1.

Posisi dan kondisi di atas, menurut hemat penulis terus berkembang dalam strata sosial masyarakat Indonesia sampai sekarang, apalagi pada era Soekarno. Kita tidak bisa menafikan dalam kehidupan masyarakat yang masih menggunakan istilah *darah biru, abdi dalam, darah ningrat, kelompok elit, kaya dan miskin*, dan lain sebagainya.

Kelompok santri, priyayi dan abangan menjadi bukti kalau stratifikasi sosial di Indonesia sangat kental, walaupun dalam wilayah tertentu, kondisi ini sudah mulai pudar. Tetapi dalam kondisi yang lain masih kuat, terutama dalam masalah kepemimpinan, perjodohan dan pergaulan serta pergumulan sehari-hari.

Itulah sebabnya kenapa posisi Soekarno tidak diakui sebagai seorang pemimpin Islam. bahkan dalam hemat penulis, pengakuan dan label Kiyai, merupakan gelar khusus untuk kelompok yang memiliki darah keturunan Kiyai dan memiliki pondok pesantren, sementara Soekarno bukan, walaupun Soekarno banyak menulis kajian dan persoalan tentang Islam, ia banyak menulis dan berpidato serta mengeluarkan pemikiran-pemikiran keislaman baru dan pengembangan sesuai kondisi jaman.⁵ Robert N. Bellah dikutip Bernard Dahm bahwa pemikiran keislaman Soekarno terlalu maju, sehingga masyarakatnya belum siap menerimanya. Padahal Islam itu sendiri sangat *progress*, Islam adalah kemajuan.⁶

Soekarno menggugat pemikiran umat Islam yang cenderung telah melupakan ajaran Islam. Kondisi tersebut menurut Soekarno menyebabkan umat Islam mundur, baik dalam perjuangan kebangsaan maupun dalam pengembangan pemikiran ajaran Islam.⁷

Benar disini sudah ada perserikatan-perserikatan “kaoem moeda”, benar disini sudah ada Muhammadiyah atau Persatuan Islam atau perkumpulan-perkumpulan “moeda” yang lain, tetapi belumlah disini mendengung secara benar suara-ajakan Rasionalisme itu. Sebab, baik didalam Muhammadiyah

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ Benhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Terj. Hasan Basri, (Jakarta : LP3ES : 1987). hlm. 322.

⁷ Ke-Islam-an Soekarno dari pemikiran al-Afghani, Abduh, Arabi, Pasya, Mustafa Kamil, Faridz bay, Ali Bay, Ahmad Bay, Muhammad Ali dan Shaukat Ali, pada tahun 1921 atau setidaknya tahun 1926, sebagai dilihat pada tulisannya yang berjudul “*Nasionalisme Islamisme, Markisme*”. Tokoh yang paling sering kutipannya diambil Soekarno adalah Mustafa Kemal (38) yaitu pada tulisannya yang berjudul “kearah persatuan” (1928), tabir adalah lambang perbudakan (1939), apa sebab Turki memisah agama dari negara-negara (1940), dan *saja kurang Dynamis* (1940), dan *Masjarakat Onta dan masjarakat Kapal Udara* (1940). Tokoh ketiga adalah Amir Ali (15), yang diikutinya sewaktu menulis surat-surat Islam dari *Ende* (1934), memudahkan pengertian Islam (1940), *Masjarakat Onta dan Masjarakat kapal* (1940), dan *Islam Sontolojo* (1940). Lihat Surat Soekarno No. 5 tanggal 15 September 1935, dalam *Soerat-soerat Islam dari Ende*, Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Loc. cit.*, hlm., 329-320. Baca juga Imam Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso (ed) *Soekarno ; Islam Pancasila NKRI, Loc. cit*, hlm., 32-52.

maupun didalam arti persatuan Islam, maupun didalam risalah-risalah dan majalah-majalah yang umumnya dikatakan “haloean moeda” itu, maka sendi penyelidikan agama sebenarnya masihlah sendi yang tua.⁸

Mereka statis dan telah terbiasa dengan Islam *sontoloyo*. Menurut Soekarno, penyebab statisme ini adalah pensakralan fiqh dan berbagai ijma' ulama' yang kemudian berujung pada penutupan pintu ijtihad. Fiqh telah menjadi algojo roh-semangat Islam.⁹ Soekarno mengutip pendapatnya Farid Wajdi yang mengatakan bahwa Islam bisa maju jika dilandaskan pada kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, dan kemerdekaan pengetahuan. Maka, roh yang selama ini dirantai oleh fiqh haruslah dilepas rantainya, akal yang selama ini dipasung oleh ijma' ulama' haruslah dibuka pasungannya, dan pengetahuan yang selama ini ditutup haruslah dibuka tutupnya. Dengan mengutip Syed Amir Ali, Soekarno mengatakan bahwa Islam itu seperti karet, karena itu tidak ada yang bisa membatasi kemerdekaan roh, akal, dan pengetahuan dalam Islam.¹⁰

Konsep keislaman Soekarno di atas, merupakan konsepsi Soekarno sebelum menjabat presiden, yakni karena dorongan yang kuat untuk mempersatukan umat Islam yang mengalami pertentangan antara kalangan tradisional dan kalangan modernis. Soekarno menggagas konsep baru untuk mempertemukan diantara keduanya. Konsepsinya tersebut berbentuk gagasan-gagasan baru untuk memperbaharui konsepsi yang ada. Atas gagasannya tersebut, penulis melihat kecenderungan Soekarno pada posisi modernis dibandingkan tradisional. Selanjutnya, konsepsi Soekarno setelah menjabat sebagai presiden mengalami perubahan, konsep kesatuan dan persatuan bangsa menjadi pilar utama sehingga menggagas bentuk negara tidak Islam, merumuskan dasar negara adalah Pancasila dan mewujudkan demokrasi terpimpin sebagai wujud ideal negara kesatuan Indonesia serta untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, Soekarno melihat tiga komponen bangsa, yakni Nasionalis, Agama dan Nasakom. Namun dalam pembahasan disertasi ini dibatasi dalam lingkup perdebatan dari dua kelompok besar, yakni perbedaan antara kalangan Nasional Sekular dengan Nasional Islam.

Pada tahun 1940, Soekarno menulis beberapa artikel mengenai sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Dalam Majalah *Pandji Islam* nomor

⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁹ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁰ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, *Loc. cit.*, hlm., 374-375.

12 dan 13,¹¹ ia menulis artikel berjudul “Memudakan Islam”. Menurut Soekarno langkah-langkah sekularisasi yang dilakukan Kemal Attaturk adalah tindakan “paling modern dan radikal”. Soekarno berkata bahwa “Agama dijadikan urusan perorangan, bukan dihapuskan di Turki.”¹²

Soekarno mengatakan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT ialah murni untuk menegakkan agama, tanpa bermaksud mendirikan negara atau pemerintahan Islam.¹³ Sebutan negara Islam muncul setelah berakhirnya masa Nabi maupun para sahabatnya. Rasul sendiri tidak pernah menyebut masyarakat Madinah sebagai pemerintahan Islam (*al-hukumat al-Islamiyat*) atau negara Islam (*al-daulat al-islamiyat*) tetapi hanya umat Islam.¹⁴ Negara Islam Madinah baru dimunculkan oleh W. Montgomery Watt, karena melihat perangkat pemerintahan di Madinah yang memenuhi syarat-syarat minimum sebagai sebuah negara modern.¹⁵

Kemudian, Soekarno mengutip pendapat Frances Woodsmall, yang mengatakan bahwa :

“The attitude of modern Turkey towards Islam has been anti-orthodox, or anti-ecclesiastical, rather than anti-religious... The validity of Islam as a personal belief has not been denied. There has been no cessation of the services in the mosque, or rather religious observances.”¹⁶

Soekarno berkata bahwa untuk keselamatan dunia dan kesuburan agama – bukan untuk mematikan agama itu- urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama menjadi hak individu.- “*Geef den Keizer wat des keizers is, en God wat Godes is.*¹⁷ Pemisahan agama dengan negara dalam konsep Soekarno menurut hemat penulis bahwa gagasan Soekarno tersebut merupakan gagasan baru dan tidak umum pada masa itu, karena dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia yang

¹¹ Imam Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso (ed) *Soekarno ; Islam Pancasila NKRI* (Jakarta : Komunitas Nasionalis Religius Indonesia : 2006), hlm., 32.

¹² *Ibid.* hlm. 52.

¹³ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942.* (Jakarta : LP3ES 1991). Hlm., 303. Baca juga Abdullah Shodiq, *Sekularisme Soekarno dan Mustafa Kemal.* (Pasuruan : PT Garoeda Buana Indah : 1994). Hlm 27. Serta baca juga Maslahul Falah, *Islam Ala Soekarno Jejak Langkah Pemikiran Islam Liberal Indonesia.* (Yogyakarta : Kreasi Wacana : 2003)., hlm. 36.

¹⁴ Soekarno mengatakan: “entah apa sebabnya aku tidak menjumpai perkataan “negara” itu dalam kamus Islam”, lihat *Negara Nasional dan Cita-cita Islam, op. cit.* hlm.6.

¹⁵ W. Montgomery Watt, *Muhammad Project and Statemen,* (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 94-95, 240; berbagai kebijaksanaan Muhammad tersebut muncul dari *creative imaginatio*-nya yang menghasilkan ide yang relevan bagi pertanyaan pokok tentang eksistensi kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Mark Jurgensmayer, *Menentang Negara Sekular,* (Bandung ; Mizan : 1998), hlm. 29.

cenderung mengklaim tentang pemahaman akan penyatuan negara dengan agama. Pandangan Soekarno tersebut mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh Islam, antara lain yaitu ; A. Hasan dan M. Nasir dan Agus Salim.

A. Hassan mengkritik pandangan Soekarno tentang sekularisme di majalah yang sama. A. Hassan menulis artikel berjudul “Memudahkan Pengertian Islam”. Hassan menyebutkan kalau logika Soekarno sebagai “logika otak lumpur”. Menurut A. Hassan sebagian besar pejabat pemerintah Turki di masa Attaturk adalah pemabok, hobi dansa, pelaku maksiat, menghapus hukum-hukum Allah, dan tulisan Arab diganti dengan Latin. Akan tetapi tindakan Attaturk dipuji Soekarno sebagai tindakan modern dan radikal. Lebih lanjut, A. Hassan mencontohkan bahwa di negara Rusia, orang Islam bebas shalat di masjid dan boleh adzan dalam bahasa Arab. Sedangkan di Turki, oleh Kemal Attaturk, adzan harus dilakukan dengan bahasa Turki. A. Hassan juga membantah logika Soekarno bahwa pengaruh Islam di Turki hilang kerana tidak diurus oleh pemerintah. Faktanya, penguasa Islam waktu itu tidak menjalankan dan mengurus Islam sebagaimana semestinya. Bahkan, tak jarang kalau agama hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, kata A. Hassan, ini bukan berarti Islam tidak sanggup mengurus negara.¹⁸

Selain perdebatan di atas, perdebatan antara Soekarno dan A. Hasan mengenai hadits yang berbunyi : “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman.” Menurut Soekarno hadits itu shahih dan umat Islam harus melaksanakan itu, sedangkan menurut A. Hassan itu hadits palsu. A. Hassan sangat keberatan dengan pandangan Soekarno yang hendak menundukkan wahyu dan sunnah Rasul dengan akal dan ilmu pengetahuan.¹⁹

Selain perdebatan dengan A. Hasan, Soekarno terlibat perdebatan dengan M. Natsir tentang masalah yang sama, yakni tentang hubungan Negara dengan agama. Menurut M. Natsir bahwa tindakan mengaitkan agama dengan negara, dapat menjurus pada sikap otoriter pada penguasa. Sikap Soekarno didukung oleh para ulama tradisional. Timbulnya sikap tersebut, dikarenakan sikap penguasa dan tokoh agama yang memeralat wibawa keagamaan untuk mempertahankan kedudukan mereka.²⁰

¹⁷ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, jilid pertama cet. ke dua (Jakarta : Panitia Dibawah Bendera Revolusi : 1963), hlm., 403-445.

¹⁸ M. Thalib dan Haris Fajar, *Dialog Soekarno-A. Hassan*, (Yogyakarta : Sumber Ilmu ; 1985)., hlm.75-89.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁰ Menjadikan agama sebagai landasan budi dan moral bagi pemerintahan, berarti mengaitkan semua kegiatan hidup dengan rasa keagamaan. Sejalan dengan ini, Muhammad ‘Abd Al-

Usaha Natsir untuk berjuang menyatukan agama dan negara terus berlanjut, yakni dalam sidang Konstituante tahun 1955-1959. Pada sidang Konstituante pada 13 November 1957, Natsir menyampaikan pidato yang bersejarah tentang Islam dan sekularisme. Pidato itu sangat mengagumkan, sehingga Hamka mengubah sebuah puisi berjudul “*Kepada Saudaraku M. Natsir*”, yang memuat kekaguman Hamka kepada M. Natsir. Dalam pidato itu, M. Natsir mengupas tuntas kelemahan sekularisme, yang dia katakan sebagai paham tanpa agama atau *la diiniyah*. M. Natsir mengatakan: “Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya di dalam batas keduniaan. Seorang mazhab sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan.

M. Natsir dengan tegas menawarkan kepada Sidang Konstituante agar menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kata M. Natsir, “Jika dibandingkan dengan sekularisme yang sebaik-baiknya pun, maka adalah agama masih lebih dalam dan lebih dapat diterima oleh akal. Setinggi-tinggi tujuan hidup bagi masyarakat dan perseorangan yang dapat diberikan oleh sekularisme, tidak melebihi konsep dari apa yang disebut mazhab humanity (peri-kemanusiaan).²¹ Menurut M. Natsir bahwa Islam bukan hanya berurusan dengan masalah iman dan peribadatan, melainkan dengan berbagai masalah masyarakat. Ketika ia mengemukakan pandangan tentang konsep negara dalam Islam, ia sebenarnya berfikir positif dalam kerangka kebangsaan.²²

Soekarno sendiri tidak menolak kehadiran partai Islam yang memperjuangkan berlakunya syari’at Islam. Ia bahkan menganjurkan agar partai-partai Islam bisa memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya dalam parlemen. Namun intinya, konsep syari’at Islam itu harus melalui proses uji publik, tidak bisa didekritkan melalui konstitusi. M. Natsir menolak argumentasi yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa tidak ada ijma (kesepakatan) para ulama tentang persatuan agama dengan negara. Tidak adanya ijma menandakan bahwa persatuan agama dengan negara bukan merupakan satu kemestian, tetapi satu hal yang setiap saat dapat ditinjau kembali. M. Natsir menolak kesimpulan Soekarno itu dengan mengatakan :

‘Arabi dalam kaitannya *Nizham Al-Hukm fi Al-Islam*, menyatakan wajib menyandarkan pengajaran politik, ekonomi dan pemerintahan dengan pengajaran akhlak dan aqidah. Alasannya karena setiap Allah menetapkan kewajiban atau larangan bagi seorang muslim, pernyataan itu selalu dirangkaikan dengan iman dan taqwa kepada-Nya, lihat Musthafa Kamal Washfi, *Al-Sulthat Al-Sya’biat fi Nizham Al-Islam*, Kuliah Umum di Universitas Omdurman 1968/1969, hlm. 9.

²¹ M. Thalib dan Haris Fajar, *Dialog Bung Karno-A. Hassan, 1985: Loc. cit*, hlm. 122

²² M Dawam Rahardjo, Published June 1, 2009 Agama Leave a Comment Tags : Ahmadiyah, Ahmadiyya, Indonesia, Islam, Islam Liberal, Loc. cit., hlm., 2.

Orang menyatakan; “Tak ada ijma’ ulama tentang agama dengan negara harus bersatu”. Baik! Mana pula “ijma” ulama yang mengatakan bahwa agama dan negara tidak harus bersatu? Juga tidak ada. Kalau dalam hal ini akan dipakai ijma ulama sebagai alasan, sudah tentu yang satu mau “memisahkan” dengan alasan tak ada ijma ulama untuk “bersatu”, dan yang lain mau “mempersatukan” sebenarnya hal “Persatuan Agama Dengan Negara” ini tidak begitu sulit kalau kita tidak sengaja membuat sulit.²³

Agama Islam itu bukanlah semata-mata satu “tambahan” atau “extra” yang harus “dimasukkan” kepada *staat*, namun menurut *outlook* kita *staat* itulah yang menjadi alat dan perkakas bagi Islam. Di sini terletak perelisihan “outlook” seorang Islam dengan “outlook” orang lain.²⁴

Perdebatan terbuka juga terjadi antara Soekarno dengan Haji Agus Salim. Soekarno menginginkan nasionalisme sekular setelah Indonesia merdeka. Sementara Agus Salim menolak pendapat Soekarno karena ia khawatir terjatuh pada *chauvinism* atau ultra nasionalisme. Agus Salim lebih menginginkan nasionalisme Islam, karena lebih bersifat universal.²⁵

Menurut penulis bahwa Perdebatan Soekarno dengan A. Hasan, M. Natsir, dan Agus Salim merupakan perdebatan prinsip tentang idealisme bentuk negara yang akan dibentuk. Sehingga masing-masing bersikukuh pada pendiriannya. Namun sangat disayangkan, karena usaha A. Hasan, M. Natsir, dan Agus Salim tidak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam perjuangannya dalam sidang BPUPKI.

Sementara Soekarno berusaha menggandeng kelompok sekular lainnya di Indonesia sehingga berhasil menggagalkan berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan Islam. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, kelompok nasionalis sekular terus berhadapan dengan kelompok nasionalis Islam. Kedua kelompok ini akhirnya bersepakat membentuk Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno dan pada tanggal 9 Juli 1945 dan berhasil menyusun Piagam Jakarta. Piagam ini memuat kata-kata: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

²³ M. Thalib dan Haris Fajar, *Dialog Bung Karno-A. Hassan, 1985: Loc. cit*, hlm. 122

²⁴ *Ibid.* hlm. 51.

²⁵ Agung Pribadi, *Debat Sepanjang Zaman Islam Vs Pancasila: Refleksi Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni (Piagam Jakarta, peristiwa sebelum dan sesudahnya)* OPINI| 01 June 2012 | 13:06., hlm. 1.

(yang kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”. Soekarno mengatakan, bahwa "tujuh kata" itu adalah "kompromi untuk mengakhiri kesulitan kita bersama."²⁶

Maka di sinilah menurut hemat penulis, letak *kelogowoan* tokoh Islam di dalam mempertimbangkan keutuhan dan kesatuan bangsa, mereka rela mengorbankan cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Pengorbanan inilah harusnya menjadi catatan penting dalam sejarah penetapan dasar dan rumusan negara. Namun persoalan tersebut terlupakan dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Rumusan Pancasila yang ada sekarang ini – tanpa proses perdebatan – kondisi inilah yang terlupakan dalam sejarah bangsa.

Adapun panitia sembilan dengan lima orang mewakili golongan nasionalis sekular, yaitu Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, Maramis dan Subardjo sedangkan 4 orang lainnya mewakili nasional Islam, yakni ; Abdul Kahar Muzakir,²⁷ Wachid Hasim, Agus Salim dan Abikusno Tjokro Sujoso.²⁸

Hasil dari panitia sembilan tercantum dalam sebuah dokumen. Dokumen ini pula yang disebut "Piagam Jakarta” (Jakarta Charter) oleh Muh. Yamin. Adapun rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Rumusan kalimat yang populer di masyarakat mengenai rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

²⁶ Lihat: *Risalah Sidang BPUPKI* yang diterbitkan Sekretariat Negara RI. Seperti diketahui, hasil kompromi ini, kemudian dibatalkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kerana kelompok Kristian di Indonesia bagian Timur memberikan ultimatum, jika Piagam Jakarta tetap dimasukkan ke dalam UUD 1945, maka mereka akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Lihat: Moh. Natsir, "*Tanpa Toleransi Takkan Ada Kerukunan*", dalam buku *Fakta dan Data*, ed. Lukman Hakiem, (Jakarta ; Media Dakwah ; 1991), hlm. 44-45.

²⁷ Abdoel Kahar Moezakir atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakir, adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945 - 1948 dan 1948 - 1960. Ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tokoh Islam yang pernah menjadi anggota Dokuritsu Zunby Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ini pula yang tetap dipertahankan ketika UII dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948. Ia menduduki jabatan sebagai Rektor UII sampai tahun 1960. Pada masa sejarang beliau diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. untuk lebih jelas lihat Casper, Scott E. *Constructing American Lives: Biography and Culture in Nineteenth-Century America*. (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999.), hlm. 117.

5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Dalam sidang BPUPKI, Abdul Kahar Mudzakkir gencar mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun wakil golongan Islam hanya 15 orang, golongan Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis seperti Soekarno dan Hatta, yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan ruh dan naskah otentik Pembukaan UUD 45. Kontroversi seputar Piagam Jakarta membuka perdebatan sengit sehingga akhirnya tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh Abdul Kahar Mudzakkir dan Abdul Wahid Hasjim menunjukkan kebesaran hati untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara demi mempertahankan keutuhan Indonesia. Maka dari itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara, ketika menjadi Menteri Agama era 80-an menyatakan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam kepada bangsa dan negara Indonesia.³⁰

K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur menyuarakan supaya Islam dijadikan sebagai dasar negara. Mereka berdua yang terus-menerus mengusulkan Islamisasi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia yang akan diproklamirkan. Perjuangan kedua tokoh NU tersebut untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara jelas terlihat dari saran dan usul-usul mereka dalam sidang-sidang BPUPKI.³¹

K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur yang mengusulkan supaya dibuat suatu ketentuan bahwa “hanya figur orang Islam yang boleh dipilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia” dan bahwa pasal mengenai agama harus berbunyi “Agama negara adalah Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lainnya untuk menganut agama mereka ...”. Kedua tokoh ini beralasan “bagaimana mungkin kalimat dalam preambule UUD (Piagam Jakarta) yang mengatakan ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dapat terlaksana dengan baik jika presidennya tidak tegas dinyatakan harus beragama Islam” dan mengenai perlunya ditegaskan bahwa “agama negara adalah Islam”, menurut Wahid Hasyim, hal tersebut sangat penting artinya bagi pertahanan negara dikemudian hari. Wahid Hasyim beralasan pertahanan yang

²⁸ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra ; 2009), hlm. 240-241

²⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

³⁰ Tashadi, *Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir*. (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 20

³¹ *Ibid.*, hlm. 22

didasarkan pada keyakinan agama akan sangat kuat, karena menurut ajaran Islam, orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk ideologi agama.³²

PPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan pembukaan UUD yang disusun oleh panitia sembilan karena rancangan pembukaan UUD itu ditandatangani oleh panitia sembilan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, maka pembukaan itu disebut Piagam Jakarta.³³

Tanggal 11 Juli 1945 Latuharhary menyatakan keberatannya terhadap Pancasila, yang dibantah Agus Salim. Soekarno kemudian menengahi dan mengingatkan, “Piagam ini sudah hasil kesepakatan bulat dan resmi.” Pada tanggal 14 Juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan Piagam Jakarta dan ingin menjadikannya lebih Islami. Soekarno kembali mengingatkan bahwa Piagam Jakarta sudah merupakan kesepakatan bulat antara golongan nasionalis dengan golongan Islam.³⁴

Soekarno mengatakan bahwa jangan sekali-sekali mendirikan Negara Islam karena akan menyakiti orang-orang non Islam. Kesalahan Soekarno adalah, *pertama* sebagai pemimpin Negara dan bangsa yang seharusnya tidak berpihak, sementara Soekarno berpihak pada kelompok nasionalis sekular. Hal ini dikuatkan oleh BJ Boland –seorang pastor dari Belanda- dalam bukunya *Pergumulan Islam di Indonesia*. *Kedua*, pembentukan Negara dengan ideologi apapun baik itu Komunis, Sosialis, Pancasila, atau Islam dibolehkan dalam UUDS 1950 yang berlaku saat itu, asal memenuhi syarat. Hal ini berlanjut terus dalam polemik di media massa dan kampanye-kampanye pemilu dari tahun 1953-1955 dan dilanjutkan dengan perdebatan bebas di Konstituante.³⁵

Perdebatan di Konstituante adalah antara yang membela Islam versus yang membela Pancasila. Hal ini disebabkan karena pertentangan ideologi di antara mereka, yaitu antara nasionalis, komunis, dan non Islam di satu pihak, dengan nasionalis Islam di pihak lain. Namun dalam sidang Konstituante, partai-partai yang mewakili aspirasi umat Islam bersatu untuk mengusahakan Islam sebagai dasar

³² T. B., Simatupang, *Antara Citra dan Fakta*, dalam Aristides Katoppo (ed.), *80 Tahun Bung Karno*, (Jakarta : Sinar Harapan ;, 1982), hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ Agung Pribadi, *Debat Sepanjang Zaman Islam Vs Pancasila: Refleksi Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni.*, *Loc. cit*, hlm. 3.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Negara melawan Pancasila yang didukung kalangan nasionalis, non Islam dan golongan yang bertentangan dengan Islam, serta Komunis.³⁶

Usulan Islam sebagai dasar Negara selain ditentang oleh faksi-faksi non Islam, ditentang pula oleh Atmodarminto, yang mengaku sebagai wakil dari Islam abangan, seorang yang menjunjung tinggi Sinkretisme. Menurutnya, Islam di Indonesia itu masih banyak dipengaruhi kepercayaan dan adat istiadat nenek moyang, jadi masyarakat kita belum masyarakat Islam. Atmodarminto juga khawatir jika Islam dijadikan dasar Negara, hanya orang-orang Islam sajalah yang mempunyai hak penuh dan warga Negara non-Islam pasti akan dikurangi haknya.³⁷

Persoalan di atas, menurut hemat penulis disebabkan karena kekhawatiran kelompok sekular. Mereka lupa kalau Nabi Muhammad ketika pada periode Madinah membuat kesepakatan atas nama agama tetapi Islam memberi kebebasan kepada kaum yang tidak seagama melalui Piagam Madinah yang di dalamnya nampak terlihat kebijaksanaan-kebijaksanaan “Islam sebagai *rahmatat lil ‘alamin’*. Ada aturan yang digunakan untuk orang Islam dan bukan orang Islam dalam pembelaan Madinah ketika menghadapi serangan dari dunia luar, yakni Quraisy Mekkah.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik benang merah tentang Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam, yakni ; *pertama*; mengenai rumusan dan konsep yang dikembangkan Soekarno dalam Pembaharuan Pemikiran Islam. *Kedua*, tentang Pemikiran Sekularisasi Politik Islam dimana terjadi pertentangan dengan tokoh-tokoh politik Islam dalam merumuskan bentuk Negara dan penyusunan Undang-undang Dasar 1945. Maka penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisa lebih dalam tentang dua persoalan tersebut di atas sehingga dapat menjawab dengan jelas mengenai Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dieksplorasi secara empirik mengenai Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam, sebagaimana dalam perumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam, yakni sebagai berikut :

1. Mengapa Soekarno menggagas Pembaharuan Pemikiran dalam Islam ditengah-tengah perdebatan antara kalangan tradisional dan modernis ?

³⁶ Simorangkir, O.P., 2002., *Renungan Bung Karno Bapak Marhaen Indonesia*, (T.K. ; Tim Studi Pembudayaan Pancasila Universitas Krisnadwipayana 2002), *Ibid.*, hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

2. Bagaimana gagasan Soekarno tentang sekularisasi politik Islam di Indonesia ditengah perdebatan antara kelompok nasional sekular dengan nasionalis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah Bagaimana latar belakang Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam, dengan memberikan argumentasi rasional dan obyektif sehingga dapat difahami maksud dan tujuan dari pandangannya. Bagaimana latar belakang Pemikiran Soekarno tentang prmbaharuan dalam pemikiran Islam dan pemikiran sekularisasi politik Islam dengan memisahkan antara agama dengan negara sebagai bentuk kemajuan negara dan agama Islam di Indonesia, sehingga secara makro dapat dijadikan khasanah pemikiran keislaman. Dengan maksud tersebut, maka secara operasional penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengumpulkan data empirik sebagai bahan merumuskan konsep teoritik berkenaan dengan paradigma yang berkembang dalam rangka memahami Mengapa Soekarno menggagas ide pembaharuan dalam pemikiran Islam ditengah-tengah perdebatan antara kalangan tradisional dan modernis?
2. Untuk mengumpulkan data empirik sebagai bahan merumuskan konsep teoritik berkenaan dengan paradigma yang berkembang dalam rangka memahami Bagaimana gagasan Soekarno tentang sekularisasi politik Islam di Indonesia ditengah perdebatan antara kelompok nasional sekular dengan nasionalis Islam?

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian tentang Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sebuah masukan atau input bagi para pengamat politik dan semua pihak yang terkait, bahwa Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam sebagai manifestasi keislaman yang berfungsi dan bermakna bagi pencerahan umat Islam Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab kontroversial mengenai Pemikiran Soekarno dengan menganalisa konsep Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam untuk diletakkan dalam kerangka perjuangan memajukan kehidupan umat Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan survey ke beberapa program Pasca Sarjana, namun penulis hanya mendapatkan beberapa disertasi tentang Soekarno, yakni disertasi yang dilakukan oleh : *pertama*, Muhammad Ridwan Lubis pada program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul tentang Pemikiran Soekarno Tentang Islam dan unsur-unsur Pembaharuannya. Beliau menitikberatkan pada persoalan kelompok-kelompok Islam dengan melihat kelompok pesantren dan kelompok pembaharu di mana beliau membandingkan antara kedua kelompok tersebut.

Selanjutnya, Dr. Muhammad Ridwan Lubis menjelaskan tentang Soekarno sebagai tokoh sentral Nasional dengan mengetengahkan pemikiran Politik Soekarno baik dalam Marhaenisme, Panca Sila maupun dalam Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.

Sedangkan ia juga menjabarkan bagaimana kedudukan Islam dalam pemikiran Soekarno dengan merinci konsep Islam dan unsur-unsur pembaharuan dalam pemikiran ke-Islaman Soekarno serta tanggapan terhadap pandangan pemikiran Soekarno dengan menguraikan bahwa ajaran Islam tidak bisa serba rasional, dan bukan dengan madhab kemudian menimbulkan kemunduran Islam.

Kedua, disertasi lain yang ditulis Ulfa. M. tahun 2010 berjudul *Relasi Negara dan Islam Refleksi atas Konsep Bernegara Soekarno* di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penitikberatan Ulfah dalam disertasi tersebut pada makna dan relasi negara dan agama. Tetapi dalam kajian lebih dalam, justru Ulfah menyatakan bahwa tidak ada ijma ulama mengenai negara. Posisi ini tentunya paradok dengan tema sentral mengenai relasi negara dan Islam. Idealnya menurut penulis, Ulfah mencari dasar hubungan atau relasi negara dan Islam bukan pemikiran terbalik dengan pokok bahasan yang dikemukakan.

Ketiga, disertasi karya Michael Densmoor, yang berjudul *The Control And Management Of Religion In Post -Independence, Pancasila Indonesia*, tahun 2010 menjelaskan Pancasila sebagai ideologi politik Indonesia berupaya membangun secara intensif dalam membentuk Republik Indonesia. Setelah Kemerdekaan, Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai narasi pemersatu bagi negara. Namun pernyataan sederhana Pancasila perlu diberi makna. Teori gerakan sosial melihat bagaimana politik menggunakan frame sebagai sarana untuk menciptakan narasi. Pemerintahan Soekarno telah mbingkai prinsip pertama (sila) – Ketuhanan Yang

Maha Esa --dalam tindak lanjut agenda politik. Periode *pertama*, Sukarno, seorang nasionalis radikal yang melihat Pancasila sebagai cara untuk memastikan integritas teritorial dengan memasukkan orang-orang Kristen di kelompok bangsa yang baru didirikan. Periode *kedua*, di bawah Suharto, seorang otokrat tanpa kompromi yang melihat Pancasila sebagai cara membangun negara yang stabil dengan menghilangkan pemberontakan Islam bersenjata Darul Islam dan Partai Komunis Indonesia kekerasan (Partai Komunis Indonesia -PKI). Suharto memanfaatkan Pancasila sebagai sarana menolak baik Islam dan negara ateistik. Periode akhir berada di bawah penguasa demokratis yang lebih plural. Dalam periode ini, agama sedang mengglobal dan tidak lagi terbatas pada entitas teritorial. Sebagai agama dibebaskan dari wilayah dan budaya, Pancasila telah diambil pada peran menciptakan komunitas nasional antar agama golongan.

Keempat, Disertasi berjudul *Islamic, Politic sand Ideology in Indonesia : A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila Dcpartmegt : Islamic Studics*, McGill University karya De-rec : Ph, D., Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis respons Muslim Indonesia pada Pancasila, idiologi negara di Indonesia. Repons Muslim pertama terjadi ketika usulan dari kelompok Nasionalis-Sekuler, yakni pada saat sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 dan dalam perdebatan Majelis Konstituante (1956-1959). Bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara. Disertasi ini akan menganalisis bagaimana tiga era modern pemerintah Indonesia -Soekarno, Soeharto dan berbagai pemimpin Demokrat -telah didefinisikan ulang Pancasila untuk memfasilitasi visi mereka tentang negara untuk mengontrol dan mengelola agama dalam mendukung visi dan agenda masing-masing.

Sedangkan dalam penelitian jurnal baik nasional maupun internasional, penulis menemukan beberapa jurnal, yaitu ;

Pertama, Lili Romli menulis *Islamic Party Portrait of Reform Era In Indonesia - UKM*.³⁸ Lili menjelaskan secara rinci Selama demokrasi parlementer, peran partai-partai Islam mewarnai demokrasi dan pemerintahan. Partai-partai Islam merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pembentukan kabinet. Setiap formasi kabinet, partai-partai Islam memegang peranan kunci dalam membentuk pemerintahan koalisi. Pemilihan 1955, yang merupakan pemilu pertama setelah kemerdekaan Indonesia, enam partai Islam yang kontestan dan diakui pemerintah

³⁸ Journal Article. ukm. UMY 6783. 1. IJIT. Vol. 4. Dec-2013 *International Journal of Islamic Thought*. Vol. 4: (Dec.)

yakni, Masyumi, NU, PSII, Perti, Partai Pesartuan Tharikhah Islam (PPTI). Hasil Pemilu 1955 menunjukkan partai-partai Islam tidak memperoleh suara mayoritas. Masyumi naik 20,9% suara, NU naik 18,4% suara, PSII naik 2,0% suara, Perti naik 1,3% suara, PPTI dan akui setiap naik 0,2% suara. Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom. Akibatnya, partai-partai Islam split 'menjadi dua, kelompok yang mendukung ideologi Nasakom yang diwakili oleh NU dan mereka yang menentang, yang diwakili oleh Masyumi. NU memasuki lingkaran kekuasaan untuk mendukung ideologi Nasakom Soekarno.

Kedua, L Assyaukanie – menjelaskan secara gamblang mengenai peran Partai politik Islam terbesar yakni Masyumi yang dihapuskan oleh Soekarno. Padahal peran dan perjuangan Masyumi begitu besar. Soekarno menganggap bahwa tokoh-tokoh Masyumi sulit untuk diajak komunikasi bahkan dipandang sebagai partai yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa..

Ketiga, Saoki membahas judul *Islam sebagai Dasar Negara (Perdebatan dalam PPKI dan Konrtituante)*.³⁹ Saoki menjelaskan secara rinci mengenai perdebatan antara Natsir (mewakili kelompok Nasional-Islam) dan Soekarno (mewakili Nasionalis-Sekular) mengenai dasar negara, baik dalam PPKI maupun dalam konstituante. Kelompok Islam yaitu; K. H. Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Masykur, K.H. A. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosujoso, H. Agus Salim, Sukiman Wiryosanjoyo, K.H. A. Sanusi, dan K.H. Abdul Halim, sedangkan wakil dari kelompok nasionalis, antara lain, Rajiman Widioldiningrat, Soekarno, Mohammad Hatta, Prof. Soepomo, Wongsonegoro, Sartono, R. P. Soeroso, Dr. Buntaran Martoatmojo dan Muhammad Yamin, untuk Ketua dan wakil ketua BPUPKI dijabat oleh Rajiman Widioldiningrat dan R. P. Soeroso, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan BPUPKI berada di tangan kelompok nasionalis. Akan tetapi karena banyaknya anggota Badan Penyelidik yang malah dikhawatirkan akan membawa kegagalan Badan Penyelidik itu sendiri (atas perdebatan yang semakin memanas) maka dibentuklah Panitia Kecil BPUPKI yang hanya terdiri dari 9 orang itu, yaitu: empat orang dari kalangan Islam (H. Agus salim, K.H. Wahid Hasyim, Abikusno, dan Abdul Kahar Muzakkir) dan lima orang dari

³⁹ Jurnal, Prisma, No 8, 1984 yang dimuat ulang tanggal 7 januari 2014, dengan judul *Islam sebagai Dasar Negara (Perdebatan dalam PPKI dan Konrtituante)*.

kalangan Nasional (Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Achmad Subarjo, dan M. Yamin).

Pada sidang konstituante terjadi perdebatan mengenai bentuk negara. Saiki menjelaskan lebih jauh dengan pandangan Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, yang berpendapat sebagai berikut : Abdurrahman Wahid berpendapat kalau Islam di Indonesia dijadikan faktor alternatif, yakni diideologikan, maka fungsinya bisa terdistorsi karena yang muncul bukanlah struktur yang lebih baik melainkan *konflik horizontal* dan ancaman disintegrasi bangsa. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi, sebab pendapat Islam sebagai ideologi hanya akan menyamakan agama itu setaraf dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia.

Keempat, Fransiskus Borgias M. dengan judul : *Nasakom: Soekarno's Failed Political Move* Parahyangan Catholic University, Bandung.⁴⁰ Fransiskus menjelaskan bahwa selama Dua puluh tahun setelah Soekarno diangkat sebagai presiden Republik Indonesia, Soekarno jatuh dari kekuasaannya. Tahun-tahun berikutnya, merupakan tahun yang sulit bagi Soekarno dalam membangun dan melanggengkan kekuasaannya dan juga bagi Indonesia secara umum karena banyaknya persoalan yang dihadapinya baik kritik, dan juga oposisi dari para tokoh politiknya. Itulah sebabnya pada tahun 1965 Sukarno membuat gerakan politik untuk menyatukan semua kekuatan politik Indonesia dengan mengedepankan tiga upaya: 1) Menciptakan perasaan yang kuat dari oposisi terhadap kolonialisme-imperialisme, imperialisme barat khususnya di dalamnya berbagai bentuk baru; Sukarno menyebutnya Nekolim, standsfor neokolonialisme-imperialisme (baru kolonialisme-imperialisme). 2) Memperkuat cinta nasional, menghargai, dan apresiasi dari Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 3) Menciptakan politicalattempt baru untuk menyatukan semua ideologi di Indonesia dengan coining Nasakom. Dalam membaca sejarah saya upaya firsttwo lebih atau kurang berhasil karena masyarakat Indonesia setuju dengan oposisi untuk Nekolim dan mendukung ideologi negara, Pancasila. Tapi untuk menyatukan tiga unsur dalam satu bundel adalah masalah adifferent.

Tulisan ini adalah tentang gerakan politik Soekarno pada awal tahun enam puluhan untuk menyatukan aliran thedifferent di Indonesia sehingga energi seluruh bangsa bisa dialokasikan untuk rancangan kebaikan bersama masyarakat Indonesia.

⁴⁰ This Article has been published in En Arche, Indonesian Journal of Inter-Religious Studies, Vol 1. Number 2, 2012, pp.125-148; ISSN: 2088-8228 ; Published by ICRS-yogya student council.

Ini adalah gerakan politik Sukarno yang bertujuan menyelamatkan negara. Menurut Anderson, Konsep NASAKOM, digagas oleh Sukarno selama periode Demokrasi Terpimpin, dirancang untuk mendorong saling percaya dan kerja sama antara kelompok dan partai-partai yang biasanya diklasifikasikan dalam masing-masing tiga rubrik". Langkah ini isknown dalam akronim, Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunis (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Saya menyebutnya sebagai "percobaan" karena ini adalah jenis kreativitas politik Soekarnoin penampilan publik sebagai demagog a. Dalam posisi tersebut ia menciptakan beberapa slogan-slogan politik, akronim. Misalnya: Manipol Usdek, Ganefo, Nasakom, Nekolim, dan termasuk slogan yang diambil dari bahasa Latin, Vivere di Periculoso. Ini adalah jenis seni retorika yang digunakan oleh Soekarno dalam pidato politiknya.

Kelima, J. Lee menulis dengan judul *The Failure of Political Islam in Indonesia* .⁴¹ " J. Lee menjelaskan mengenai bagaimana hak dan kewajiban seorang muslim dalam memilih pemimpin. Kewajiban muslim untuk bekerja keras membangun citra diri sebagai teladan dan contoh bagi yang lain. Umat Islam sebagai mayoritas karena penduduk Indonesia hampir 90 persen mengaku sebagai umat Islam, tapi kalah bersaing dalam mengumpulkan suara dalam pemilihan umum, sehingga kursi yang didapatkan hanya sedikit apabila dibandingkan dengan yang lain.

Perbedaan mendasar dari beberapa disertasi dan jurnal di atas dengan kajian yang dilakukan penulis adalah dalam persoalan Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam sehingga sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Kajian mendalam dalam disertasi penulis adalah tentang perubahan pemikiran dan gagasan keislaman Soekarno sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan dalam politik Islam. Wujudnya adalah bentuk transformatif pemikiran Soekarno yang mengalami perubahan secara signifikan antara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran Soekarno sebelum kemerdekaan pada persoalan teks al-Qur'an, yakni sekitar persoalan fiqh dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan setelah kemerdekaan, penekanannya pada persoalan kenegaraan sesuai dengan persoalan dan masalah yang berkembang pada waktu itu.

⁴¹ Ithaca, NY: Cornell University Press, ... Stanford *Journal of East Asian Affairs* dengan judul *The Failure of Political Islam in Indonesia* This quote comes from a speech that *Sukarno*

F. Kerangka Kajian

Kajian ini berbeda dengan kajian politik Islam pada umumnya, yang lebih mengedepankan substansi pemikiran dari pada konteks yang diartikulasikan pemikiran itu.⁴² Bahwa pemikiran, terkait dengan obsesi orang yang bersangkutan.⁴³ Sehubungan dengan hal itu, telaah ini dilakukan dengan asumsi bahwa apa yang difikirkan seseorang didasari nilai-nilai yang mengobesi dirinya

Terkait dengan pernyataan di atas, gerak interlektual soekarno dan gerak sosial politik Soekarno terobsesi kepercayaan atau ideology, pemikiran dan perilakunya. yang dijiwai oleh nilai-nilai liberal, humanis dan transendental

Dalam sub-bab ini, akan dijelaskan kerangka fikir yang pada akhirnya mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa Soekarno memiliki pemikiran politik Islam yang transformatif. Dalam kajian ini, issue sekularisme hanyalah salah satu dari berbagai (keseluruhan) issue yang difikirkannya. Telaah dimaksudkan untuk memahami pembaharuan keislaman dan sekularisme sebagai bagian dari keseluruhan pemikiran Islam politik.

Penulis menggunakan ide-ide dasar dari transformasi Bill Gould seorang Pakar *Transformational Thinking*, yang dijelaskan oleh Daldiyono dalam bukunya berjudul, *How to Be a Real and Successful Student*. Bahwa dalam proses transformasi, senantiasa ada tiga sistem yang beroperasi secara simultan, yakni sistem perilaku (*behavior system*), sistem berfikir (*thinking system*) dan sistem kepercayaan (*belief system*).⁴⁴ Karena ini adalah studi tentang pemikiran, maka kehirauan langsung penulis adalah sistem *thinking*. Hanya saja, berangkat dari teorisasi Gould, *system thinking* yang beroperasi ini tidak bisa dilepaskan dari dua sistem yang lain, yakni sistem perilaku dan sistem kepercayaan. Ketika pemikiran Soekarno ditelaah di bab-bab berikut dalam naskah ini, sistem tersebut selalu difahami kaitannya satu sama lain.

Praktek berfikir, sebagaimana diajarkan oleh Gould di atas, niscaya berlangsung dalam sautu rangkaian sistemik. Artinya betapapun mengejutkan hal

delivered on June 1,1945, before the ... Herbert Feith and Lance Castles, Indonesian *Political Thinking*, 1945'1965..

⁴² Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama Masalah Dan Pemikiran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 64.

⁴³ Karel A. Steenbrink, *Metodologi Penelitian Agama Islam di Indonesia Beberapa Pentunjuk Mengenai Penelitian Naskah melalui: Sya'ir Agama Dalam Bahasa Melayu Dari Abad 19* (Semarang : LP3M IAIN Walisongo, 1988), hlm. 4.

yang difikirkan dan kemanapun arah pemikirannya tetap saya bisa melacakinya karena adanya keterkaitan sistemik. Ada rasionalitas yang khas yang menandai tapak-tapak pemikiran seseorang, termasuk pemikiran Soekarno.

Sistem pemikiran yang dibahas di sini adalah yang bisa dipinjam untuk mengungkap pemikiran Soekarno. Dari berbagai corak sistem pemikiran yang teridentifikasi, penulis terbantu oleh kerangka analisis yang dipakai oleh Kuntowijoyo. Jelasnya selain Bill Gould sebagai acuan pangkal, penulis juga menggunakan kerangka analisis Kuntowijoyo, tentang pemikiran transformatif. Telaah Kuntowijoyo ini sangat membantu memahami arah pemikiran seseorang, terutama yang terkait dengan pemikiran keagamaan. Lebih jelasnya, yang diacu adalah epistemologi yang diadopsi beliau yakni epistemologi integralistik.⁴⁵ Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dirujuk di sini adalah kerangka analisis yang dipakai Kuntowijoyo dalam menganalisis pemikiran seseorang, bukan isi fikirannya tentang Islam.

Kerangka fikir ini ditemukan dari pembacaan secara seksama buku-buku Kuntowijoyo yang berjudul *Identitas Politik Umat Islam*. Di sana terdapat beragam istilah diantaranya Transformasi Politik dan Transformasi Budaya. Bagi Kuntowijoyo, manifestasi pemikiran transformatif harus ditemukan dari pemilahan antara Transformatif yang Politis dengan Transformatif yang bersifat kultur. Proses transformasi merujuk pada perubahan nilai atau orientasi.

Ada tiga nilai yang diusulkan oleh Kuntowijoyo untuk menandai arah transformasi yang dia usulkan, yakni: (1) liberty, (2) humanity dan (3) transendensi. Proses transformasi yang diidealkan beliau adalah mengarah pada liberalisasi, humanisasi, dan trasendental.

Berangkat dari tawaran Kuntowijoyo tersebut di atas, studi ini memaknai liberty, sebagai pembebas keterpurukan. Dengan konsep ini, maka setiap gerakan baik itu gerakan pemikiran intelektual maupun gerakan sosial politik yang bertujuan untuk membebaskan belenggu keterpurukan, ketertinggalan, keterjajahan dan keterbelakangan akan dimaknai sebagai pembebasan (liberasi).

Istilah humanity dipakai dalam pengertian konsep Kuntowijoyo adalah menghormati dan menghargai manusia, yakni menolak ketidakadilan, diskriminatif,

⁴⁴ Daldiyono, *How to Be a Real and Successful Student*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. ; 2009), hlm. 144.

dan rasis. Dengan konsep ini, maka setiap gerakan baik itu gerakan pemikiran intelektual maupun gerakan sosial politik yang bertujuan untuk menolak kolonialis, diskriminasi dan rasisme akan dimaknai sebagai humanisasi.

Adapun tentang transendensi, penulis bermaksud untuk menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah kehendak dan untuk Tuhan. Dengan konsep ini, maka setiap gerakan baik itu gerakan pemikiran intelektual maupun gerakan sosial politik yang bertujuan hanya semata-mata pengabdianya kepada Dzat yang Maha Transenden.

Kelangsungan transformasi itu niscaya melibatkan berbagai kekuatan penggerak. Karena penekanan Kuntowijoyo dalam penyusunan kerangka fikir ada pada aspek epistemologis, kerangka fikir itu tidak cukup detail dalam menjelaskan apa yang menggerakkan pemikiran. Oleh Kuntowijoyo memang ditunjukkan adanya kekuatan politik dan kekuatan kultural namun tidak tersedia petunjuk detail untuk memahami energi penggerak suatu pemikiran. Sehubungan dengan hal itu, studi ini meminjam kerangka analisis Karl Stenbrink dalam memahami gerak transformatif. Karl Steenbrink membagi dua alur gerak transformatif, yakni gerak transformatif intelektual dan gerak transformatif sosial politik. Pemilahan ini sangat tepat ketika digunakan untuk menelaah pemikiran Soekarno, yang bukan hanya sibuk berfikir melainkan juga gigih mentransformasikan realita sosial pada jamannya. Soekarno bukan hanya pemikir yang sangat artikulatif dalam menyampaikan gagasan-gagasannya, melainkan juga sangat mengakar pada masyarakat pada jamannya.

Tipologi yang ditawarkan Stenbrink sangat membantu dalam memperlakukan Soekarno sebagai pemimpin pergerakan. Artinya, yang penting untuk dipegang dalam menggunakan kerangka fikir Karl Steenbrink bukan hanya adanya dua kategori tersebut, melainkan adanya saling keterkaitan antara keduanya. Asumsinya, Soekarno sukses memimpin Indonesia karena sanggup mempertemukan dua dimensi gerakan: gerak intelektual dengan gerak sosial. Point ini perlu dikedepankan karena kenyataan bahwa Soekarno adalah pemimpin pergerakan yang memiliki tapak yang jelas di kedua sisi tersebut. Dalam aktualisasi kepemimpinannya, Soekarno niscaya menghayati gerak sosial masyarakat Indonesia untuk diartikulasikan dalam pemikirannya, dan juga sebaliknya, memimpin pergerakan untuk mewujudkan gerak intelektual yang menggelora dalam dirinya.

⁴⁵ Untuk lebih jelas, lihat Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu ; Efstimologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta : Tiara Wacana ; 2006), hlm. 27-47.

Dengan mengkaitkan dua kategori Karl Steenbrink tersebut di atas, juga terbuka peluang untuk mengantisipasi perubahan gerak pemikirannya. Atinya, dalam kapasitas dan posisinya sebagai pemimpin, ada kalanya tekanan Soekarno lebih mengedepankan gerak sosialnya dan dalam situasi ini gerak pemikiran yang ada dalam dirinya menjadi penopang gerak sosial tersebut. Namun, dalam kesempatan lain, Soekarno mendedikasikan dirinya melalui pergumulannya dengan gerak sosial, dan pada gilirannya, dari pergumulan dalam gerak sosial itu mengkristal dalam gerak intelektualnya. Dengan kerangka fikir ini, bisa diantisipasi perbedaan pemikiran Soekarno ketika masih muda dengan pemikiran Soekarno setelah dewasa.

Perlu juga ditegaskan bahwa dalam telaah ini, Soekarno diasumsikan tidak terisolasi dari sistem-sistem bergulir. Oleh karena itu, keterkaitan antara pemikiran atau gerak intelektual (dalam istilah Karl Steenbrink) bisa dibayangkan sebagai resultante dari bekerjanya tiga sistem yang dijelaskan Gould. Jelasnya, kalaulah secara personal Soekarno adalah pemikir yang *independent, independency* itu, bagaimanapun juga diwarnai oleh dinamika sistem sebagai difahami oleh Gould. Tiga lapis sistem yang dipetakan oleh Gould diposisikan sebagai *background* penting dalam pelacakan pemikiran Soekarno. Dalam konteks ini segera terpetakan, bahwa gerak sosial (sebagaimana disebut Stembrink) terkait dengan sistem. Sejalan dengan hal itu, gerak intelektual (dalam istilah Stembrink) bekerja sebagai suatu sistem berfikir (dalam istilah Gould). Implikasinya ketika kita memberlakukan epistemologi integratif yang ditawarkan Kuntowijoyo, kita bisa membayangkan proses berfikir yang dilakukan seseorang (dalam hal ini Soekarno) adalah proses yang terpola sebagai suatu sistem, dimana di dalamnya ada seorang pemimpin (Soekarno) yang mengarungi sistem itu untuk menciptakan perubahan.

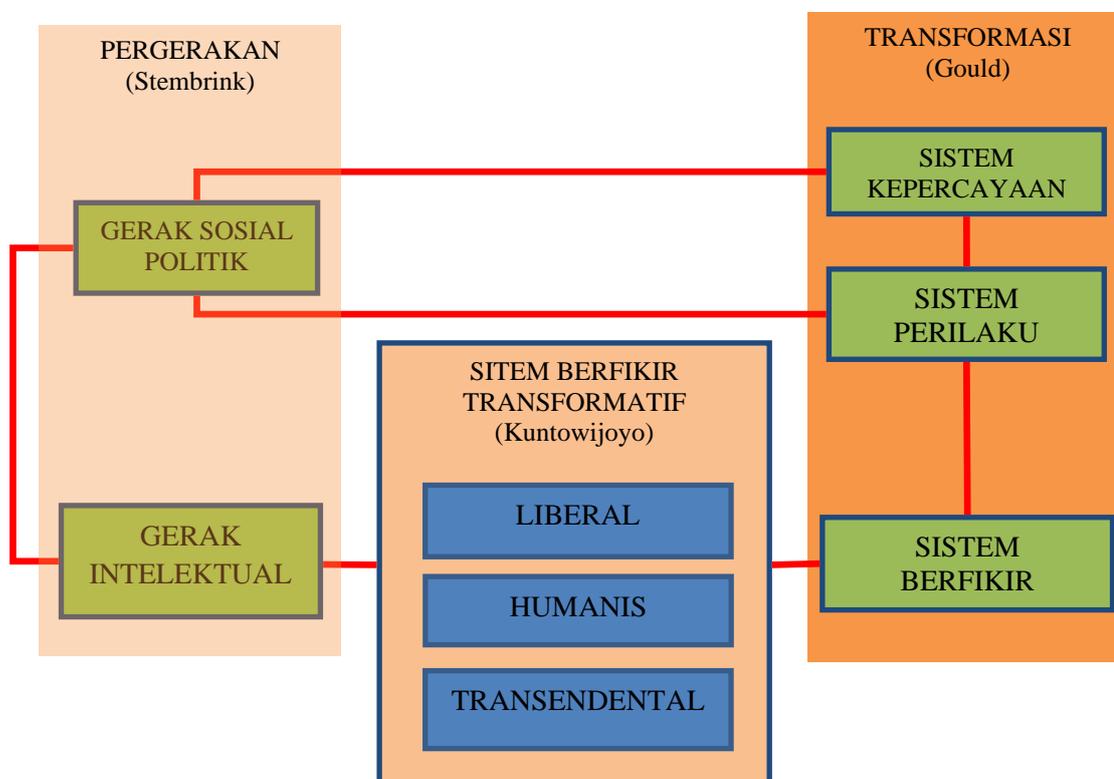
Gould menerjemahkan nilai “transformatif” dalam sistem perilaku, sistem berfikir dan sistem kepercayaan relevan dengan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan trasendental, maka penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Sistem kepercayaan Bill Gould jika dihubungkan dengan teori transformatif Kuntowijoyo yang memaknai transformatif sebagai “liberalisasi (pembebasan keterpurukan), humanisasi (memanusiakan manusia), dan transesdental (transformasi Ilahiyah)”, maka “sistem kepercayaan”, yang transformatif adalah sistem kepercayaan yang memiliki roh liberalisasi, humanisasi, dan transendental. Kalau sistem kepercayaan dimaknai sebagai ideologi, maka

ideologi tersebut adalah ideologi untuk membebaskan keterpurukan manusia seperti kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan. Sistem kepercayaan yang humanis berpihak pada nilai kemanusiaan, dan ideologi yang transendental yang dilandasi nilai-nilai ilahiyah.

2. Sistem perilaku transformatif Bill Gould jika jika dihubungkan dengan teori transformatif Kuntowijoyo yang memaknai transformatif sebagai “liberalisasi (pembebasan keterpurukan), humanisasi (memanusiakan manusia), dan transesndental (transformasi Ilahiyah)”, adalah sistem perilaku yang dijiwai karakter liberalisasi, humanis, dan transendental. Perilaku yang didasari pemikiran rasional dan empiris cenderung memberikan pembebasan dari keterpurukan. Sedangkan perilaku humanis Kuntowijoyo cenderung pada pemahaman untuk memanusiakan manusia. Perilaku transendental mengarah pada perilaku yang berorientasi teologis, mendasarkan keseluruhannya pada nilai-nilai transendental.
3. Sistem berpikir transformatif Bill Gould jika jika dihubungkan dengan teori transformatif Kuntowijoyo yang memaknai transformatif sebagai “liberalisasi (pembebasan keterpurukan), humanisasi (memanusiakan manusia), dan transesndental (transformasi Ilahiyah)”, maka mengandung pembebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan transformasi. Kebebasan berfikir ini masuk pada wilayah profane dalam kontek politik dan negara. Tetapi faham ini bukan berarti melepaskan agama, karena agama memiliki wilayah tersendiri yang sakral. Sedangkan sistem berfikir humanis didasari pada pemikiran yang rasional berpijak pada pengalaman empiris. Pemikiran humanis cenderung mengangkat derajat manusia manusia. Pemikiran transendental mengarah pada pemikiran yang berorientasi teologis, mendasarkan keseluruhannya pada nilai-nilai transendental yang berlaku di masyarakat dengan mengangkat persamaan dan bukan mempermasalahkan perbedaan diantara keyakinan, budaya, ras, warna kulit dan lain-lain.

Gambar 1
Peta Ide Yang Menjadi Acuan dalam melacak
pemikiran Soekarno



Penulis mencoba memadukan ide-ide dasar transformatif Bill Gould dalam sistem perilaku, sistem berfikir dan sistem kepercayaan dengan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan trasendental. Selanjutnya, penulis jabarkan konsep di atas dalam dua gerak transfromatif yang sesuai dengan pendapat Karl Steenbrink, yakni dalam dua alur gerak transformatif sosial politik dan gerak transformatif intelektual. Menurut penulis, Ide-ide dasar transformatif Bill Gould relevan dengan transformatif Kuntowijoyo dan Karl Stembrink dengan rumusannya sebagai berikut :

1. Sistem kepercayaan dan Sistem perilaku dari teori transformasi Bill Gould bertemu dengan gerak sosial politik Karl Steenbrink.
2. Sistem berfikir dari teori transformasi Gould bertemu dengan konsep transformatif yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan trasendental Kuntowijoyo menjadi gerak intelektual Karl Stembrink.

Teori-teori transformatif di atas, Bill Gould, Kuntowijoyo dan Karl Steenbrink relevan dengan Pemikiran Transformatif Soekarno dalam politik Islam, yakni sebagai berikut :

1. Sistem kepercayaan dan Sistem perilaku dari teori transformasi Bill Gould bertemu dengan gerak sosial politik Karl Steenbrink dalam pemikiran Soekarno melahirkan pemikiran pembaharuan dalam Islam dan pemikiran sekular.
2. Sistem berfikir dari teori transformasi Gould bertemu dengan konsep transformatif Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan transendental menjadi gerak intelektual Soekarno.

Dari analisa di atas, maka menurut penulis bahwa ide-ide dasar transformatif yakni Sistem kepercayaan dan Sistem perilaku serta Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould, transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan transendental serta gerak intelektual dan sosial politik Karl Steenbrink sangat untuk mengkaji *pemikiran transformatif Soekarno dalam politik Islam*.

Berangkat dari ide-ide dasar transformatif, yakni sistem kepercayaan dan sistem perilaku serta sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould, transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi, humanisasi, dan transendental serta gerak intelektual dan sosial politik Karl Steenbrink, penulis melihat dari sisi pemikiran Soekarno yang mengalami transformatif dalam dua hal, yakni ; pemikiran transformatif sebelum kemerdekaan, yakni tentang Ide-ide pembaharuan Soekarno dalam Islam dan pemikiran transformatif setelah kemerdekaan, yakni pemikiran tentang Sekularisasi politik Islam Soekarno. Adapun ringkasan pemikiran transformatif Soekarno dalam politik Islam sebagai berikut :

1. Ide-ide pembaharuan Soekarno dalam Pemikiran Islam sebelum kemerdekaan

Kajian tentang Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam sangat menarik, karena paling tidak akan memunculkan beragam pemikiran dalam Islam. Pembahasan pemikiran sekularisasi politik Islam akan melahirkan pemikiran tradisional yang berhadapan dengan kelompok modernis integralistik, kelompok tekstualis berhadapan dengan kelompok kontekstual.⁴⁶

⁴⁶ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiah Idiologis di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah : 2007)., hlm. 108.

A. Luthfi Assyaukani mengklasifikasikan kelompok dalam Islam, yaitu: *Pertama*, kelompok Islam Tradisionalis yaitu kelompok Islam Adat atau *Customary Islam*. *Kedua*, kelompok Islam Modernis yaitu kelompok Islam *mutahawwil* atau kelompok liberal-modernis atau kelompok Islam reformistik. *Ketiga*, kelompok Islam Liberalis yaitu kelompok Islam *mutahawwil* yang berpandangan bahwa tidak ada otoritas teks, yang ada hanya otoritas akal, kelompok Liberal-Sekularis atau kelompok Islam Transformatik. Keempat, kelompok Islam Fundamentalists yaitu kelompok Islam al-Tabit, kelompok Islam Revivalis atau kelompok Islam Ideal-Totalistik.

Sementara untuk perkembangan pemikiran umat Islam Indonesia mengalami beberapa kecenderungan, yaitu : *Pertama*, Gerakan liberalisasi yang diusung Harun Nasution yang dikenal “Islam Rasional”-nya dan Nurcholishh Madjid dengan “Sekularisasi” sebagai penggerak ‘pemikiran baru’,⁴⁷ serta gerakan arus pemikiran kontemporer yang berkembang di Islam dan Barat, mampu mendekonstruksi pola pemikiran umat Islam Indonesia dengan mencairnya kelompok aliran.⁴⁸

Kedua, kelompok tradisional dan pembaharu yang mengalami perubahan.⁴⁹ Ketiga, gerakan Islam Fundamentalists yang mempunyai cita-cita untuk mendapatkan kembali *The Golden Age of Islam*,⁵⁰ yakni gerakan Padri seperti Wahabiyah di Saudi Arabia,⁵¹ dan DI/TII SM Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949, serta NII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Gerakan

⁴⁷ Nurcholishh Madjid menyatakan bahwa Umat Islam Indonesia telah mengalami kejumudan dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam. Kemudian Ia menganjurkan untuk melakukan “Liberalisasi pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam” melalui proses sekularisasi, *intellectual freedom*, *idea of progress* dan sikap *inclusive*. Pemikirannya mendapat reaksi keras ketika Ia menyampaikan pidato keagamaan “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia” di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992. Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.,123 dan Nurcholishh Madjid, *Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.,325 serta Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis : Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.,574.

⁴⁸ M. Rasjidi, *Koreksi terhadap Drs. Nurcholishh Madjid tentang Sekularisasi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Endang Saefuddin Anshari, *Kritik atas Faham dan Gerakan Pembaharuan Nurcholishh Madjid*, (Bandung: Bulan Sabit, 1973). hlm., 54 dan Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hlm.,58.

⁴⁹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi Kaum Muda NU Merobek Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.,31

⁵⁰ Kalim Siddiqui, *Seruan-seruan Islam: Tanggung Jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Syari'at*, terj. Akhmad Affandi dan Humaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). hlm.,22.

Daud Beureuh di Aceh.⁵² Kelompok keempat, yaitu kelompok Islam Radikal – yang kemudian dikenal dengan - Gerakan Salafi Militan.⁵³

Pada tipologi ini, menurut penulis bahwa Soekarno berada pada kelompok pembaharu (modernis) dan Islam kontekstual. Soekarno banyak menggagas tentang pemikiran keislaman. Tulisan Soekarno yang populer dalam buku berjudul *Di bawah Bendera Revolusi* secara rinci, yaitu “Nasionalisme Islamisme, Markisme”. “kearah persatuan”, Tabir adalah lambang perbudakan, Apa sebab Turki Memisah Agama dari Negara, dan Saya Kurang Dynamis, dan Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara, surat-surat Islam dari Ende, Memudahkan pengertian Islam (1940), Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal, dan Islam Sontolojo (1940).⁵⁴

Dengan demikian, maka penulis memposisikan Soekarno pada kelompok pembaharu dan kontekstual. Hal ini didasarkan pada Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stenbrink.

2. Pemikiran Transformatif Soekarno Tentang Sekularisasi Politik Islam Sesudah Kemerdekaan.

Pengelompokan keislaman dalam tipologi pemikiran Islam, penulis setuju dengan pendapatnya Munawir Sadzali yang dikutip Haedar Nashir dalam disertasinya berjudul *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah tahun 2007, beliau membagi tiga kelompok muslim tentang pandangan kesatuan antara agama dengan negara. Pendapat tersebut, yakni :

- a. Islam bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan tuhan. Melainkan Islam adalah agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan bernegara. Di dalamnya mengatur sistem

⁵¹ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm.,50

⁵² Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*,. Loc. Cit, hlm.,282.

⁵³ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES dan KITLV, 2008), hlm.,31.

⁵⁴ Untuk lebih jelas bisa baca, Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Loc. cit., hlm. 102-207.

ketatanegaraan atau politik, yakni zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur-Rasidin, sehingga dalam pemahaman kelompok ini bahwa tidak bisa dipisahkan antara agama dengan negara. Adapun tokohnya ialah Syekh Hasan Al-Bana, Sayyid Quyyb, Syekh Muhammad Rasyid Ridal, dan Al-Maududi.

- b. Islam tidak mengatur hubungan dengan negara. Nabi hanya seorang rasul yang mengajak manusia untuk menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan tidak mendirikan negara Islam. Pemahaman kelompok ini bahwa negara harus terpisah dari agama. Adapun tokohnya ialah Thaha Husain dan Ali Abd Al-Raziq
- c. Dalam ajaran Islam tidak terdapat sistem ketatanagaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika kehidupan bernegara. Tokohnya ialah Muhammad Husain Haikal.⁵⁵

Kelompok pertama menurut Haedar disebut aliran tradisional atau integralistik, aliran kedua disebut dengan kelompok sekular atau reformis-sekular sedangkan kelompok ketiga disebut kelompok modernis.⁵⁶ Pengelompokan tersebut disebabkan karena kondisi dunia Islam yang suram yaitu : *pertama*, kehilangan kreatifitas dan menafsirkan karya ulama terdahulu.⁵⁷ *Kedua*, kehilangan kontrol terhadap akulturasi budaya luar Islam untuk melakukan ritual dan tawasul.⁵⁸ *Ketiga*, menyibukkan diri membangun kesalehan teologis “sufi”.⁵⁹ *Ketiga*, hal tersebut mengidentifikasi munculnya gerakan Islam Tradisional,⁶⁰ atau Revivalis atau Fundamentalis.⁶¹

Dari pengelompokan di atas, penulis memosisikan Soekarno dalam kelompok nasionalis sekular. Hal ini terungkap dalam pernyataan Soekarno

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

⁵⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.,13.

⁵⁷ Nurcholishh madjid, “*Tradisi Syarah dan Hasiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*”, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budhy Munawar-Rachman (ed). (Paramadina: Jakarta, 1994), hlm.,311.

⁵⁸ Tentang ziarah ke makam para wali di Dunia Islam seperti Mesir, Sudan, Maroko, Tunisia, Turki, dll, Lihat Henri Chambert Loir dan Claude Guillot (ed). *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*,. ter. Jean Couteau et.al (Jakarta: Serambi, 2007). hlm., 211.

⁵⁹ Tarekat pada periode ini adalah tarekat Qadiriyyah, Sadziliyyah, Satariyyah, dll. Lihat Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm., 32.

⁶⁰ Nurcholishh madjid (ed)., *Ibnu Taimiyah, “Tangga Pencapaian”*, dalam *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm.,247..

yang mengutip pernyataan Kemal Pasha tentang pemisahan agama dan negara, “*Jangan marah, kita bukan melempar agama kita, kita cuma menyerahkan agama kembali ke tangan rakyat kembali, lepas dari urusan negara supaya agama dapat menjadi subur*”. Dengan mengutip pernyataan ini, Soekarno ingin membenarkan pendapatnya yang meninggalkan agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Ia ingin menyatakan bahwa dalam negara Indonesia yang sekular, Islam akan tumbuh lebih baik, sesuatu yang sebenarnya tak pernah dibuktikan oleh Kemal Pasha sendiri di Turki.⁶²

Sekularisme memiliki arti *fashluddin ani haya* yang artinya adalah memisahkan peran agama dari kehidupan.⁶³ Menurut Cox, sekularisasi adalah akibat logis dari dampak kepercayaan Bible terhadap sejarah.⁶⁴ Sekularisasi adalah pembebasan manusia dari arusan agama. Menurut Syed naquib Al Attas, Sekularisasi adalah pandangan dunia diperbarui sesuai dengan perubahan evolusioner sejarah.⁶⁵ Tiga komponen integral dalam sekularisasi, yaitu : *pertama, Disentchamenten of nature* atau pembebasan alam dari nada-nada keagamaan, memisahkannya dari Tuhan.⁶⁶ *Kedua, desacralization of politics*, yaitu penghapusan legitimasi sacral kekuasaan politik. *Ketiga, deconsecration of values*, yaitu pemberian nilai kepada semua karya budaya.⁶⁷ Esensi dari sekularisasi politik sesungguhnya adalah modernisasi politik yang memiliki cirri ; (a) pemisahan politik dari ideologi agama ; (b) ekspansi politik ; (c) transvaluasi kultur politik ; (d) dominasi politik atas keyakinan agama.⁶⁸ Menurut Thaha Husein, politik dan agama adalah dua hal yang terpisah.⁶⁹

⁶¹ Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini.*, ter. Abdullah Ali et al (Jakarta: Serambi, 2006), hlm.,496. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. Cecep Lukman Yasin, et.al (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm.,954.

⁶² *Ibid.*, hlm. 133.

⁶³ Taqiyuddin An-Nabhani. *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Tariqul Izzah, 2001), hlm. 413.

⁶⁴ Adian Husaini. *Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta : GIP ; 2005), hlm. 257

⁶⁵ S.N. Al-Attas. *Op. cit.* hlm. 23

⁶⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. 2010. *Loc. cit.*, hlm. 166

⁶⁷ S . N . A l - A t t a s . *Op. cit.* hlm. 21

⁶⁸ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development: an Analytic Study*. (Boston: Little, Brown and Company, 1970), hlm. 85-86.

⁶⁹ Muhammad Al-Bahiy, *Al-Fikr al-Islam al-Hadits wa Siratuh bi al-Isti'mar al-Garbiyy*, diterjemahkan oleh Su'adi Sa'ad dengan judul *Pemikiran Islam Modern*. (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986). hlm. 110.

Dalam istilah politik, sekularisme adalah suatu gerakan terhadap pengasingan agama dan kerajaan.⁷⁰ Sekularisme sering dikaitkan dengan pemisahan gereja dan negara.⁷¹ Ahli sekular lebih suka ahli politik membuat keputusan untuk sekular dari pada alasan agama.⁷² *In this respect, policy decisions pertaining to topics like abortion, contraception.*⁷³

Sekularisasi politik Islam seperti dikatakan Azzam Tamimi merupakan penyusup ke dalam pemikiran politik Islam.⁷⁴ Seperti dicatat Syamsuddin Arif proses sekularisasi dalam dunia Islam dimulai sejak dihapusnya sistem khilafah Turki Utsmani.⁷⁵ Nurcholish Madjid membuat pemikiran tanah air dengan gagasan sekularisasi yang dilanjutkan oleh Komaruddin Hidayat,⁷⁶ yang menyatakan bahwa sekularisme muncul di Turki sebagai kritik atau perlawanan balik dari gerakan republikanisme terhadap kekuasaan Uthmani.⁷⁷ Abdur Rahman Wahid menyebutkan pemisahan wewenang fungsional antara agama dan negara tidak berarti bahwa negara kita adalah negara yang murni sekular.⁷⁸ Sekularisasi dalam arti pemisahan wewenang itu harus dibedakan secara tajam dari sekularisme ataupun situasi sekular, karena dalam sekularisme tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan negara.⁷⁹ Muhammad al-Bahy menyatakan bahwa Islam dan sekularisme merupakan dua hal yang antagonistik, karena posisi Islam kebalikan dari sekularisme.

Selanjutnya, Gagasan Raziq, yakni “Nabi Muhammad itu adalah rasul dan tidak membentuk negara.” Lebih lanjut, Raziq mengatakan kalau Islam adalah, “*Risâlah lâ hukm, wa dîn lâ dawlah.*” (Islam adalah agama, bukan

⁷⁰ Feldman, Noah (2005). *Divided by God*. Farrar, Straus and Giroux, pg. 14 (“[Legal secularists] claim that separating religion from the public, governmental sphere is necessary to ensure full inclusion of all citizens.”)

⁷¹ Ira M. Lapidus (October 1975). “*The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society*”, *International Journal of Middle East Studies* 6 (4), hlm. 363-385.

⁷² Feldman, Noah *Divided by God*. (Farrar ; Straus and Giroux ; (2005), hlm. 6-8.

⁷³ Washington Post, November 15, 2006 “Think Tank Will Promote Thinking” dan “Declaration in Defense of Science and Secularism”

⁷⁴ **Azzam Tamimi, *Hamas: A History from Within* (London ; Olive Branch Press ; 2007). hlm. 372.**

⁷⁵ Syamsuddin Arif, *Menyerang Orientalis di Sarangnya*, Majalah Hidayatullah terbit tanggal 28 Mei 2008. hlm. 109.

⁷⁶ Hidayat., Komaruddin., dan M. Wahyudi Nafis, *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta Terbitan Ulang Paramadina ; 2003), hlm. 155.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 157.

⁷⁸ Luthfi. A. Assyaukanie , “*Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*”, dalam <http://media.isnet.org>, hlm. 88.

⁷⁹ Toprak, Binnaz., *Islam and Political Development in Turkey*, (Leiden : E.J. Brill, : 1981), hlm. 322.

Negara). Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im negara secara kelembagaan haruslah dipisahkan dari Islam.⁸⁰

Arkoun menganggap bahwa Islam agama sekular. Gagasan sekular terdapat di dalam al-Qur'an dan pengalaman Madinah.⁸¹ Dalam pemikiran Arkoun, gagasan sekularisasi adalah sikap spirit dan merupakan kompetisi untuk menguasai kebenaran atau mencapai kebenaran.⁸² John L Esposito berpendapat bahwa sekularisasi sebagai bentuk kebangkitan Islam (revivalisme Islam).⁸³ Tetapi al-Maududi berbeda. Al-Maududi mengakui adanya Negara Islam sebagaimana pernyataan-pernyataan Kitab Suci Al-Quran dan praktek Rasulullah serta para Khulafa al-Rasyidin.⁸⁴ Hasan Al-Bana menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, Islam merupakan agama menyeluruh dalam aspek kehidupan. Menurut Z.A. Ahmad, bahwa Daulah Islamiyah atau Negara Islam, bukan saja diajarkan oleh Nabi, tetapi juga sudah pernah dibangun pada masa hidupnya.⁸⁵ Amin Sa'id menunjukkan syarat dan rukun yang terpenuhi seputar Negara Islam, yaitu : peraturan dan undang-undang, ada pemerintahan; ada tentara; ada sumber keuangan; ada rakyat; dan ada tanah air.⁸⁶ Leonard Bender berupaya melacak keterkaitan liberalisme Islam dengan liberalisme politik di Timur Tengah. Binder menyimpulkan bahwa tanpa adanya liberalisme Islam, maka liberalisme politik tidak akan terjadi di Timur Tengah. Untuk mendukung tesis tersebut, Binder menyatakan bahwa Islam merupakan bagian dari liberalisme (*a subset of liberalism*).⁸⁷

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 225.

⁸¹ Suadi Putro, *Mohammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas* (Jakarta; Paramadina, 1998, hlm. 79).

⁸² Muhammad Arkoun, *al- 'Almanah wa al-DÊn (al-IslÊm, al-MasÊhiyyah-al-Gharb)*, Pen. HÊshim ØÊliÍ (London: DÊr al-SÊqÊ, 1990), hlm. 9-11, selanjutnya diringkas *Al- 'almanah*.

⁸³ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, (New York ; Oxford: Oxford University Press ; 1988), hlm. 88. Moaddel, Mansoor, *The Studi Culture and Politics : An Overview and Assessment. Annual Review of Sosiology 28 (2002) 359-386* Moaddel, Mansoor, *Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism : Episode a n d D i s c o u r s e*, (Chicago, University of Chicago Press. 2005), hlm. 222

⁸⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 158.

⁸⁵ Z.A. Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1956), hlm. 18.

⁸⁶ Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. (Jakarta : Paramadina :, 2001), hlm. 112. Lihat juga Antony Black. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Loc. cit.*, hlm. 539.

⁸⁷ Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Develompment Ideologies* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988). hlm. 19.

Pada tipologi ini, menurut penulis bahwa Soekarno berada pada kelompok nasionalis sekular. Soekarno sangat serius mewacanakan gagasan Indonesia yang sekular lewat diskusi-diskusi dan tulisan-tulisannya. Tercatat beberapa tulisan Soekarno yang ingin memisahkan Islam dari ranah kehidupan bernegara seperti : *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara, Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara, Islam Sontoloyo*, dan lain sebagainya. Gagasan sekularisme Indonesia ini benar-benar terwujud setelah Indonesia diproklamasikan dan Soekarno dipilih menjadi presiden pertama RI. Sebelumnya bahkan upaya ini telah menjadi bahan perdebatan yang hangat di sidang BPUPKI dan PPKI.⁸⁸

Dengan demikian, maka penulis memposisikan Soekarno pada kelompok nasionalis sekular. Hal ini didasarkan pada Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stembrink.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode historis⁸⁹ dan interpretasi. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau,⁹⁰ sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo dengan menggunakan pendekatan politikologis, yakni menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain-lain.⁹¹

Metode Historis ialah metode yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.⁹² Ciri khas penelitian historis

⁸⁸ Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. 2010. *Loc. cit.*, hlm. 176.

⁸⁹ Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik*, *Loc. cit.*, hlm., 72.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

⁹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama ; 1992), hlm. 5.

⁹² Hasan, Iqbal, "*Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* ", (Jakarta : GI ; 2002), hlm.

ialah periode waktu : kegiatan, peristiwa, karakteristik, dan nilai-nilai dikaji dalam konteks waktu.⁹³

Menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen, yang dikutip Nurul Zuriyah, penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut.⁹⁴

Sementara menurut Donald Ary dalam Yatim Riyanto yang dikutip Nurul Zuriyah, menyatakan bahwa penelitian historis adalah untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengvaluasi dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah tersebut.⁹⁵

Lebih lanjut, Nurul Zuriyah menyimpulkan pandangan yang disampaikan oleh para ahli di atas, dengan kesimpulan bahwa pengertian penelitian sejarah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu (berorientasi pada masa lalu);
2. Usaha dilakukan secara sistematis dan objektif;
3. Merupakan serentetan gambaran masa lalu yang integratif antar manusia, peristiwa, ruang dan waktu;
4. Dilakukan secara interaktif dengan gagasan, gerakan dan intuisi yang hidup pada zamannya (tidak dapat dilakukan secara parsial).⁹⁶

Sedangkan interpretasi digunakan untuk memperoleh kerangka yang luas untuk memahami pemikiran Soekarno tentang Pemikiran Transformatif Ir. Soekarno dalam Politik Islam. Maka data-data yang diperoleh memerlukan adanya penafsiran dalam menyajikannya sehingga makna dan pengertian tidak keliru dan mudah difahami.⁹⁷

⁹³ *Ibid.*, hlm. 202.

⁹⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 51.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

⁹⁷ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press : 1985), hlm. 32.

Interpretatif fenomenologis Analysis (IPA)'s adalah sebuah pendekatan untuk penelitian psikologis kualitatif dengan fokus idiografis, bertujuan untuk menawarkan wawasan ke dalam, konteks tertentu serta masuk akal dari fenomena tertentu. Biasanya fenomena ini berhubungan dengan pengalaman pribadi, seperti peristiwa besar dalam hidup, atau pengembangan hubungan penting yang berhubungan dengan asal-usul teori dalam *phenonemology* dan *hermeneutika*, dan ide-ide kunci. Interpretatif fenomenologis Analysis (IPA)'s sering digunakan oleh Husserl, Heidegger, dan Merleau-Ponty.⁹⁸ (IPA)'s adalah salah satu dari beberapa pendekatan untuk kualitatif, psikologi fenomenologis. Hal ini berbeda dari pendekatan lain, karena merupakan campuran dari komponen psikologis, interpretatif, dan idiografis.⁹⁹

Dengan demikian bahwa Interpretative Phenomenologi Analysis (IPA)s. bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan dan berusaha mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seseorang individu tentang obyek atau peristiwa. IPA berusaha memahami secara "seperti apa" dari sudut pandang partisipan untuk dapat berdiri pada posisi mereka. "Memahami" dalam hal ini memiliki dua arti. *Pertama*, yakni memahami-interpretasi dalam arti mengidentifikasi atau berempati dan makna. *Kedua*, memahami dalam arti berusaha memaknai. IPA menekankan pembentukan-makna baik dari sisi partisipan maupun peneliti sehingga kognisi menjadi analisis sentral, hal ini berarti terdapat aliansi teoritis yang menarik dengan paradigma kognitif yang sering digunakan dalam psikologi kontemporer yang membahas proses mental.¹⁰⁰

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi Pendahuluan dengan sub-sub pokok bahasan sebagai berikut ; Latar Belakang Pemikiran, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Kajian, Metode Penelitian, dilanjutkan dengan Tinjauan Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

⁹⁸ Smith, J.A. *Hermeneutics, human sciences and health: Linking theory and practice*. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being, 2, tahun 2007. hlm. 5.

⁹⁹ Gill, M. J. *The Possibilities of Phenomenology for Organizational Research*. Organizational Research Methods, 2014. hlm. 121.

¹⁰⁰ Smith, Jonathan A. (ed.). *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset*. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ; 2009), hlm. 98.

Bab II Memunculkan pembahasan mengenai Biografi dan Perjuangan serta Persentuhan Soekarno dengan Pemikiran Islam, yang meliputi pembahasan ; Biografi Soekarno, Perjuangan Soekarno serta Persentuhan Soekarno dengan Pemikiran Islam. Pada bab ini penulis ingin mengedapankan tentang biografi Soekarno yang berhubungan dengan pengalaman empirisnya, dimana Soekarno memulai bersentuhan dengan keislaman dan perjuangannya yang berhubungan dengan sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stenbrink.

Bab III akan membahas Soekarno Sebelum Kemerdekaan Menggagas Transformatif Pembaharuan dalam Islam, dengan sub pokok bahasan, yaitu ; Gagasan Soekarno dalam Pembaharuan Pemikiran Islam, Menggagas Perjuangan Soekarno dalam Gerakan Anti Kolonialisme dan Islam sebagai Agama Tauhid serta kesimpulan. Pada bab ini penulis ingin mengedapankan tentang konsep pembaharuan Soekarno dalam Islam yang berhubungan dengan Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stenbrink.

Bab IV akan membahas persoalan tentang Soekarno Sesudah Kemerdekaan Menggagas Transformatif Pemikiran Sekularisasi Politik Islam dengan sub pokok bahasan Sekularisasi Politik Islam Soekarno, Soekarno Menggagas Perjuangan Anti Diskriminatif dan Soekarno Menggagas Kesatuan dan Persatuan Demi Terjadinya Integrasi Bangsa serta Islam, Sikap dan Kebijakan Soekarno Sesudah Kemerdekaan, serta Kesimpulan. Pada bab ini penulis ingin mengedapankan tentang konsep Sekularisasi politik Islam Soekarno yang berhubungan dengan Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan) dan Humanisasi (memanusiakan Manusia) serta transedental (mengakui keberadaan tuhan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stenbrink.

Bab V merupakan bagian Penutup yang berisi Kesimpulan. Pada Kesimpulan ini, penulis ingin menjawab dua persoalan yang merupakan ide transformatif Soekarno dalam politik Islam, yakni ; *pertama* dalam konsep pembaharuan pemikiran Soekarno dalam Islam sebelum kemerdekaan. *Kedua*, konsep

sekularisasi Soekarno dalam politik Islam setelah kemerdekaan dengan menggunakan Sistem berfikir dari teori transformasi Bill Gould tentang ide-ide dasar transformatif dan transformatif versi Kuntowijoyo yang memaknai transformatif dengan liberalisasi (pembebasan dari keterpurukan), serta gerak intelektual dan sosial Karl Stembrink.